



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 293 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.



- KETIGA : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Instansi Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS



RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A.	TENAGA KESEHATAN	61	
1.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS SIANTAN HILIR
2.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS TELAGA BIRU
3.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS KHATULISTIWA
4.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE   BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
5.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS SIANTAN HULU
6.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PERUMNAS II
7.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE   BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
8.	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS RADIOLOGI-RADIOLOGI INTERVENSIONAL	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE   BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   SEKSI PELAYANAN MEDIK
9.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD PONTIANAK UTARA   SEKSI PELAYANAN DAN MUTU
10.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD PONTIANAK UTARA   SEKSI PELAYANAN DAN MUTU
11.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE   BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   SEKSI PELAYANAN MEDIK
12.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD PONTIANAK UTARA   SEKSI PELAYANAN DAN MUTU
13.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE   BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   SEKSI PELAYANAN MEDIK
14.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD PONTIANAK UTARA   SEKSI PELAYANAN DAN MUTU
15.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE   BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   SEKSI PELAYANAN MEDIK
16.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE   BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   SEKSI PELAYANAN MEDIK
17.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS SIANTAN TENGAH
18.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE   BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   SEKSI PELAYANAN MEDIK
19.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS KARYA MULIA
20.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD PONTIANAK UTARA   SEKSI PELAYANAN DAN MUTU
21.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS KHATULISTIWA
22.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PARIT H. HUSIN II
23.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS SIANTAN HULU
24.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PERUMNAS II
25.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS



NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
	(UMUM)		SIANTAN HILIR
26.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS BANJAR SERASAN
27.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS SIANTAN HULU
28.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS KAMPUNG DALAM
29.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS SAIGON
30.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PERUMNAS II
31.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS KOM YOS SUDARSO
32.	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE   BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   SEKSI PELAYANAN MEDIK
33.	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD PONTIANAK UTARA   SEKSI PELAYANAN DAN MUTU
34.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS KHATULISTIWA
35.	PERAWAT AHLI PERTAMA	5	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE   BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
36.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT
37.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS KAMPUNG DALAM
38.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD PONTIANAK UTARA   SEKSI PELAYANAN DAN MUTU
39.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PERUMNAS I
40.	PERAWAT TERAMPIL	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE   BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
41.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS KHATULISTIWA
42.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PAL LIMA
43.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS SIANTAN HULU
44.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PARIT MAYOR
45.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD PONTIANAK UTARA   SEKSI PENUNJANG LAYANAN
46.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE   BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
47.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS TELAGA BIRU
48.	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE   BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK
49.	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD PONTIANAK UTARA   SEKSI PENUNJANG LAYANAN
50.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PAL LIMA



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B.	TENAGA TEKNIS		327	
1.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN HUKUM
2.	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
3.	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN   BIDANG PERDAGANGAN
4.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG MUTASI DAN PENGADAAN APARATUR
5.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PERHUBUNGAN   SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
6.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   SEKRETARIAT BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
7.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
8.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
9.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN   SEKRETARIAT DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
10.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
11.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   BADAN PENDAPATAN DAERAH   SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
12.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
13.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
14.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
15.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
16.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA   SEKRETARIAT DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
17.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN UMUM   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
18.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN   SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
19.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
20.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
21.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III SEKRETARIS ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   INSPEKTORAT   SEKRETARIAT INSPEKTORAT   SUB BAGIAN UMUM, APARATUR, EVALUASI



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
				DAN PELAPORAN
22.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN UMUM
23.	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
24.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU II
25.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU I
26.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU III
27.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
28.	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSIDANGAN
29.	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS TENAGA KERJA   BIDANG PELATIHAN, PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
30.	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS TENAGA KERJA   BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL
31.	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER HEWAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN   BIDANG PETERNAKAN
32.	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
33.	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
34.	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	D-III KESEHATAN HEWAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN   BIDANG PETERNAKAN
35.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; D-IV PEKERJAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS SOSIAL   BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
36.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; D-IV PEKERJAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS SOSIAL   BIDANG BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL
37.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; D-IV PEKERJAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS SOSIAL   BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
38.	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG PERTAMANAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PERSAMPAHAN
39.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PARIT H. HUSIN II
40.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	3	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD PONTIANAK UTARA   SEKSI PENUNJANG LAYANAN
41.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN KEFARMASIAN
42.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS TABELAN SAMBIT
43.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	3	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD PONTIANAK UTARA   SEKSI PELAYANAN DAN MUTU
44.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	6	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD PONTIANAK UTARA   SUB BAGIAN TATA USAHA
45.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PAL TIGA
46.	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 PSIKOLOGI ; S-1 HUKUM ; S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
47.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   BIDANG KESATUAN BANGSA
48.	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI
49.	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG SUMBER DAYA AIR
50.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN   SEKSI PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
51.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   KECAMATAN PONTIANAK UTARA   SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK UTARA   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
52.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   KECAMATAN PONTIANAK UTARA   SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK UTARA   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
53.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   KECAMATAN PONTIANAK TIMUR   SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
54.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL   SEKSI PEMBINAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
55.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   KECAMATAN PONTIANAK SELATAN   SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
56.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI   SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
57.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PENDATAAN, PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH   SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENYULUHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
58.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
59.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA   SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
60.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   UPT PUSAT ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN BAHASA
61.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   KECAMATAN PONTIANAK BARAT   SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK BARAT   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
62.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   KECAMATAN PONTIANAK KOTA   SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK KOTA   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
63.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	3	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   KECAMATAN PONTIANAK TIMUR   SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
64.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   KECAMATAN PONTIANAK BARAT   SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK BARAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
65.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   KECAMATAN PONTIANAK KOTA   SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK KOTA   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
66.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA   SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
67.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   KECAMATAN PONTIANAK SELATAN   SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
68.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE   BAGIAN UMUM   SUB BAGIAN KEUANGAN
69.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR
70.	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI/HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   BIDANG



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
				PENGENDALIAN PENDUDUK
71.	PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG	D-III TEKNIK SIPIL ; D-III PERENCANAAN WILAYAH KOTA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG TATA RUANG DAN PENGENDALIAN
72.	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
73.	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS TENAGA KERJA   BIDANG PELATIHAN, PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
74.	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	S-1 TEKNIK ELEKTRO ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV TEKNIK ELEKTRO	3	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG PERLENGKAPAN JALAN   SEKSI PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL
75.	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL	6	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN   BIDANG PERUMAHAN
76.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK INDUSTRI	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3
77.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
78.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU II
79.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU III
80.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU I
81.	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV TRANSPORTASI DARAT ; S-1 TRANSPORTASI DARAT ; D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN ; D-IV TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK MESIN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN   SEKSI PENGELOLAAN PERPARKIRAN
82.	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	S-1 TRANSPORTASI DARAT ; D-IV TRANSPORTASI DARAT ; D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN   SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
83.	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV TRANSPORTASI DARAT	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN   SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN
84.	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF ; D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TRANSPORTASI DARAT ; S-1 TEKNIK MESIN ; D-IV TRANSPORTASI DARAT	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
85.	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN ; D-IV TRANSPORTASI DARAT ; D-IV TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TRANSPORTASI DARAT	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN   SEKSI OPERASIONAL DAN PELAYANAN PELABUHAN
86.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III KOMUNIKASI MASSA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN   SUB BAGIAN PROTOKOL
87.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSAT LABORATORIUM KESEHATAN   SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSAT LABORATORIUM KESEHATAN
88.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   BIDANG PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
89.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS GANG SEHAT
90.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS KAMPUNG BANGKA
91.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III FARMASI	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE   BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK
92.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS SIANTAN HILIR
93.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS KAMPUNG DALAM
94.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PERUMNAS I
95.	PENGELOLA LAYANAN	D-III KEPERAWATAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
	KESEHATAN			KESEHATAN   UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE   BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
96.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS KHATULISTIWA
97.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS TANJUNG HULU
98.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS KAMPUNG BALI
99.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PARIT H. HUSIN II
100.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS KARYA MULIA
101.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PURNAMA
102.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS SAIGON
103.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS SIANTAN TENGAH
104.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS ALIANYANG
105.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS SIANTAN HULU
106.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS TABELAN SAMBIT
107.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PAL LIMA
108.	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
109.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA   SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
110.	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK PENGAIRAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG SUMBER DAYA AIR
111.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 KIMIA ; S-1 BIOLOGI ; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
112.	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT   SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
113.	PENYULUH BAHASA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA ARAB ; S-1 BAHASA KOREA	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   UPT PUSAT ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN BAHASA
114.	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 BIOLOGI ; S-1 KIMIA ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG TATA LINGKUNGAN
115.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSIDANGAN
116.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN HUKUM
117.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANA WILAYAH DAN KOTA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   BIDANG ANALISIS DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERENCANAAN PROGRAM, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
118.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   BIDANG ANALISIS DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERENCANAAN PROGRAM, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
119.	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III LLAJ ; D-III LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN/LLASDP ; D-III PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN   SEKSI OPERASIONAL DAN PELAYANAN PELABUHAN
120.	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III LLAJ ; D-III LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN/LLASDP ; D-III PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN   SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGATURAN LALU



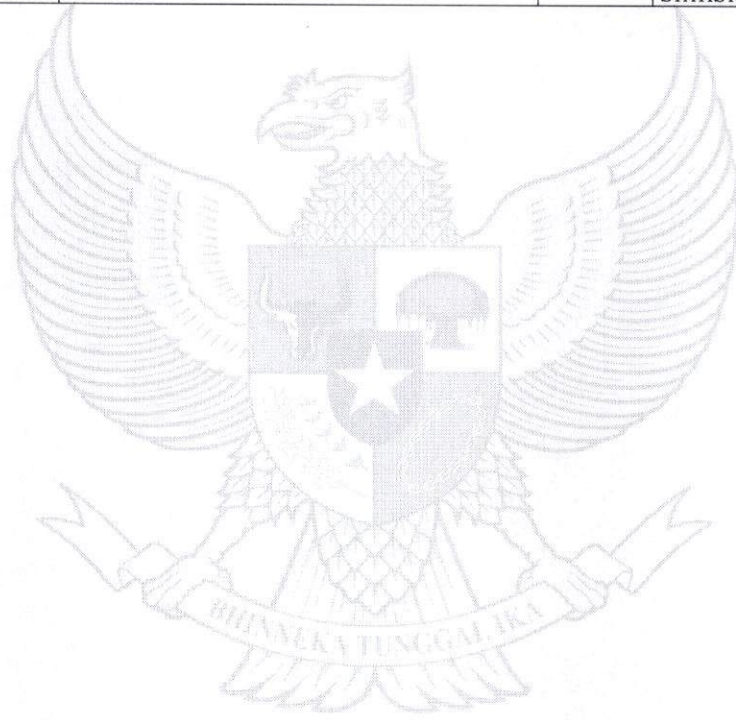
NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
				LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
121.	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III ILMU TRANSPORTASI DARAT ; D-III LLAJ	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN   SEKSI PENGELOLAAN PERPARKIRAN
122.	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III LLAJ	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG PERLENGKAPAN JALAN   SEKSI REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN
123.	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	3	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG OPERASI DAN KETERTIBAN UMUM   SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN KETENRAMAN MASYARAKAT
124.	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	20	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG OPERASI DAN KETERTIBAN UMUM   SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
125.	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	20	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH   SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
126.	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	10	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
127.	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	20	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG OPERASI DAN KETERTIBAN UMUM   SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN KETENRAMAN MASYARAKAT
128.	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG OPERASI DAN KETERTIBAN UMUM   SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
129.	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH   SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
130.	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG OPERASI DAN KETERTIBAN UMUM   SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN KETENRAMAN MASYARAKAT
131.	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
132.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
133.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN ORGANISASI
134.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   KECAMATAN PONTIANAK TIMUR   SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
135.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE   BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK   SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK
136.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
137.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
138.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA   SEKRETARIAT DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
139.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   DINAS SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
140.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   KECAMATAN PONTIANAK BARAT   SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK BARAT   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
141.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   KECAMATAN PONTIANAK UTARA   SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK UTARA   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
142.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
143.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   INSPEKTORAT   SEKRETARIAT INSPEKTORAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
144.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	3	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
145.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
146.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN   SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
147.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD PONTIANAK UTARA   SUB BAGIAN TATA USAHA
148.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS SOSIAL   SEKRETARIAT DINAS SOSIAL
149.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   SEKRETARIAT BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
150.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG PERLENGKAPAN JALAN   SEKSI PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL
151.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
152.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
153.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
154.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN   SEKRETARIAT DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
155.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
156.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
157.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   KECAMATAN PONTIANAK KOTA   SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK KOTA   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
158.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PERHUBUNGAN   SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
159.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN   SEKRETARIAT DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
160.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA   SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
161.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
162.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN UMUM
163.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   BADAN PENDAPATAN DAERAH   SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH
164.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
165.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
				SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
166.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
167.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   KECAMATAN PONTIANAK SELATAN   SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
168.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	3	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
169.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KESEHATAN   UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE   BAGIAN UMUM   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
170.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
171.	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   BIDANG STATISTIK SEKTORAL



panrb